

PEMISAHAN PEMILU DAN AGENDA PENGAWASAN KE DEPAN

Dimas Ramadhan
Populi Center

Electoral Justice

Bahwa sebuah pemilu yang adil tidak hanya diukur dari hari pemungutan suara, tetapi dari kualitas keseluruhan proses sejak perencanaan hingga penyelesaian sengketa (IDEA)

01 Integritas pemilu

02 Efektivitas dan efisiensi administratif

03 Kesetaraan dan fairness kompetisi

04 Aksesibilitas dan kemudahan bagi pemilih

05 Rule of law dan stabilitas kerangka hukum

06 Independensi EMB dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif

MK 135/2024

Alasan di balik pemisahan pemilu nasional dan daerah



I

Tumpang tindihnya tahapan pemilu

II

Inefisiensi masa jabatan penyelenggara pemilu

III

Beban kerja ekstrim

IV

Pelemahan peran partai politik

V

Tenggelamnya isu lokal

VI

Kejenuhan dan menurunkan kualitas pilihan

DAMPAKNYA PADA BAWASLU

Dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal:

Penururan resiko overload

Ketika pengawasan semua jenis pemilu tidak harus dilakukan dalam satu tahun yang sama, maka waktu bagi Bawaslu untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi dapat menjadi lebih terstruktur

Peningkatan kualitas pengawasan

Dibanding dengan pelaksanaan tahun 2024, Bawaslu akan punya waktu lebih banyak untuk melakukan evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya dan memperbaiki sistem pengawasan TPS, sistem pelaporan pelanggaran, dan mekanisme rekapitulasi suara.

Koordinasi antar lembaga lebih intensif

Bawaslu memiliki waktu untuk membangun protokol koordinasi yang lebih sistematis, menggelar rapat kerja berjenjang, dan menyusun kesepakatan teknis yang dapat mencegah konflik kelembagaan di kemudian hari.

Penambahan kapasitas organik dan ad-hoc

Penelitian tentang pengawasan pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa Bawaslu masih menghadapi hambatan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, antara lain karena sumber daya terbatas, regulasi yang tumpang-tindih, dan tekanan waktu.

Pengawasan yang lebih fokus dan tematik

Pemilu nasional menuntut pengawasan terhadap isu-isu besar seperti pendanaan kampanye lintas wilayah, disinformasi berskala nasional, efektivitas logistik, dan keamanan rekapitulasi suara. Sebaliknya, pemilu daerah erat dengan kerawanan mikro seperti politik uang berbasis jaringan lokal, keberpihakan ASN, mobilisasi birokrasi daerah, hingga konflik personal antar-elite lokal

Dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal: memberikan kesempatan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas pengawasan, namun dibutuhkan kesiapan yang jauh lebih besar agar tidak tergelincir ke dalam risiko penurunan kualitas akibat beban baru dan regulasi yang belum matang

Pengawasan berbasis tahapan

Pemutakhiran data pemilih

Supervisi Pantarlih yang lebih intensif, serta audit lapangan secara sampling maupun sensus di daerah berisiko tinggi

Verifikasi partai peserta pemilu

Dalam situasi pemisahan pemilu, verifikasi parpol terjadi jauh sebelum pencalonan legislatif dan eksekutif—memberi peluang besar bagi Bawaslu untuk memperketat standar verifikasi administrasi, melakukan verifikasi faktual secara lebih konsisten

Verifikasi Cakada dan caleg

Verifikasi dokumen secara mendalam serta membangun kanal keberatan (objection window) yang benar-benar dapat diakses oleh peserta.

Kampanye

Pemantauan politik uang secara lebih sistematis, pengawasan terhadap pergerakan ASN dan perangkat desa melalui koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan konten digital menggunakan model analitik sederhana berbasis temuan-temuan sebelumnya tentang hoaks dan SARA

Pemungutan suara

Memperkuat pelatihan KPPS dan pengawas TPS, memastikan TPS ramah pemilih, serta melakukan audit kesiapan TPS untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak sebelum hari pemungutan suara

Penghitungan suara

Mengawal pembuatan berita acara, meminimalkan ruang kosong dalam dokumen resmi, serta memastikan pengawas TPS memiliki kapasitas untuk bertahan mengawasi hingga proses selesai

REMINDER: PSU Pilkada Serentak 2024 (1)

Kategori Pelanggaran	Deskripsi	Contoh Kasus Pilkada
1. Penyalahgunaan Administrasi Pencalonan	Kesalahan verifikasi syarat calon (ijazah, domisili, dukungan parpol, masa jabatan).	Banjarbaru – calon penantang didiskualifikasi tetapi tercetak di surat suara; pemilih tidak bisa memilih calon sah.
		Boven Digoel – dokumen dukungan calon tidak diverifikasi dengan benar.
2. Ketidakprofesionalan Penyelenggara (KPU)	Administrasi tidak akurat, keliru menerapkan aturan, tidak menindaklanjuti keberatan.	Pasaman – MK menilai KPU tidak profesional dalam proses pencoblosan & rekap.

Kategori Pelanggaran	Deskripsi	Contoh Kasus Pilkada
3. Keberpihakan Aparat Desa/ASN	Mobilisasi perangkat desa/ASN, pelanggaran netralitas memengaruhi proses pemungutan.	Tasikmalaya – ditemukan keberpihakan aparat desa & masalah hak pilih.
4. Rekapitulasi Tidak Akurat	Keberatan saksi diabaikan, formulir tidak konsisten, koreksi tidak dilakukan.	Barito Utara – inkonsistensi antara C-Hasil dan rekapitulasi; keberatan saksi tidak direspons.

REMINDER: PSU Pilkada Serentak 2024 (2)

Kategori Pelanggaran	Deskripsi	Contoh Kasus Pilkada
5. Intervensi Politik Lokal	Tekanan elite lokal pada proses verifikasi atau penghitungan.	Mahakam Ulu – verifikasi calon menyimpang akibat dugaan intervensi politik lokal.
6. Permasalahan DPT & Hak Pilih	Pemilih TMS diberi surat suara, atau DPT bermasalah.	Tasikmalaya – banyak pemilih tidak memenuhi syarat tetap dilayani.
7. Rekomendasi Bawaslu Tidak Dijalankan	KPU mengabaikan perbaikan administratif yang diinstruksikan Bawaslu.	Beberapa daerah – MK menemukan rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Terima kasih

